



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

TAHUN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2023



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	8
1.3 Data Pegawai .....	9
1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan .....	9
2. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil .....	9
3. Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil.....	10
1.4 Sertifikat ASN .....	11
1.5 Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD).....	13
1.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	14
1.7 Peta Proses Bisnis.....	17
1.8 Ringkasan Hasil Evaluasi.....	19
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>22</b>
2.1 Rencana Strategis.....	22
2.2 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 .....	22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>28</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 .....	28
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini .....	28
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan 2 (dua) tahun terakhir.....	29
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah .	31
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi provinsi .....	32
3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	34
3.2 Realisasi Anggaran.....	35
3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran .....	35
3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37
3.2.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.....	38
3.2.4. Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana .....	49
3.2.5. Upaya Perbaikan Kinerja.....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>42</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan .....	9
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil.....	10
Tabel 1.3 Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil .....	10
Tabel 1.4 Sertifikat ASN pada tahun 2023 .....	11
Tabel 1.5 IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 .....	14
Tabel 1.6 Penilaian SAKIP .....	19
Tabel 2.1 Sasaran Strategis .....	22
Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dan RENSTRA 2018-2023.....	23
Tabel 2.3 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target .....	23
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2023 .....	28
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	30
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSRA .....	31
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi/Nasional .....	33
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2023 .....	36
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 .....	37
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 .....	38
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana.....	39



## BAB I PENDAHULUAN

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang selama tahun 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap tingkatan kinerja yang dicapai. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pengelolaan Pemerintahan Daerah telah mengalami dinamika perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan terencana sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang hendak dicapai adalah: **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”**. Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menjalankan salah satu misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yaitu : **“Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri “**

Berkenanaan dengan hal tersebut, sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menentukan tujuan arah kebijakan Rencana Strategisnya dalam mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ingin dicapai, yaitu: *“Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing”*.



Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Terwujudnya penyediaan air yang cukup;
3. Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur;
4. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang;
5. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah.

### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Jombang di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1. Sekretariat

##### Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

##### Fungsi, meliputi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;



- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi ;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan;
- g. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- h. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- i. Menyusun Standart Pelayanan minimal; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;



(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan aset;
- f. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Bina Marga

Tugas Pokok yakni:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang pemanfaatan, pengawasan, jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Memiliki Fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pra survei, survei dan perencanaan teknis struktur jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan survei harga bahan, alat dan upah kerja sebagai pedoman penyusunan Harga Satuan Perkegiatan;
- c. Pelaksanaan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- d. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan pendataan dalam rangka pengembangan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta penyusunan legger jalan;
- g. Pelaksanaan pemutakhiran data kondisi, status fungsi jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan penunjang jalan ;
- i. Pelaksanaan operasional penunjang pembangunan dan pemeliharaan bidang Bina Marga;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta monitoring terhadap pemanfaatan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset pemerintahan daerah di bidang jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- l. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pohon pada jaringan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.



3. Bidang Sumber Daya Air,

Memiliki Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang perencanaan, pengendalian, rehabilitasi, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumber daya air.

Memiliki Fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi;
- b. Penyusunan dokumen pengelolaan irigasi di Kabupaten Jombang ;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelompok pengelola irigasi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- e. Pembinaan kelompok pengelola irigasi;
- f. Penerbitan rekomendasi pemanfaatan aset, jaringan irigasi;
- g. Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian fasilitas sumber daya air.
- i. Pelaksanaan pengendalian aset jaringan irigasi;
- j. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
- k. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pohon pada fasilitas sumber daya air; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas .

4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:

Memiliki Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan.

Memiliki Fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penataan ruang dan pertanahan ;
- b. Pelaksanaan penyusunan peraturan teknis dan/ atau pendukung pelaksanaan peraturan penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan penataan ruang dan pertanahan ;
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama di bidang penataan ruang dan pertanahan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertanahan;
- f. Pelaksanaan penatausahaan, penatagunaan tanah dan fasilitasi permasalahan pertanahan ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

Mempunyai Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang penataan bangunan dan bina konstruksi.

Mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;



- b. Pelaksanaan penyusunan peraturan teknis dan/ atau pendukung pelaksanaan peraturan penataan bangunan dan bina konstruksi;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi kerjasama di bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- f. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan yang di berikan oleh Kepala Dinas;

### **Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **Permasalahan Bidang Bina Marga**

1. Anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan tidak sebanding dengan jumlah ruas dan kerusakan yang ada.
2. Perubahan fungsi wilayah di beberapa lokasi menyebabkan meningkatnya LHR (Lalu Lintas Harian Rata-Rata) pada beberapa ruas
3. Pengalihan arus karena beberapa proyek nasional, sehingga mempengaruhi beban pada jalan yang tidak seharusnya melewati jalan tersebut.

#### **Permasalahan Bidang Sumber Daya Air**

1. Terbatasnya pasokan air dikarenakan tidak memiliki sumber air tersendiri di kabupaten Jombang
2. Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi
3. Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih kurang
4. Konflik kepentingan pemanfaatan air irigasi masih sering terjadi
5. Pengembangan perencanaan terkait penanggulangan bencana di daerah belum memadai

#### **Permasalahan di Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi**

1. Tidak lengkapnya data bangunan gedung di Kabupaten Jombang
2. Data bangunan gedung dan PBG tidak terdokumentasi dengan baik
3. Dibutuhkan SDM Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, dan Teknik Elektro (MEP)

#### **Permasalahan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan**

1. Terdapat 2 kecamatan yang sudah memiliki RDTR namun muatannya belum mengacu pedoman terbaru dan belum terintegrasi dengan sistem OSS sehingga perlu penyesuaian kembali dengan pedoman terbaru;
2. Belum semua kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission) sebagai acuan dalam penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) karena keterbatasan anggaran daerah;



3. Belum tersedia peraturan/keputusan terkait insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten;
4. Perlunya peningkatan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat terhadap muatan rencana tata ruang (RTR) sehingga terjadi sinergitas antara pelaksanaan pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah yang telah disusun dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah.



1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG**



————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi



## 1.3 Data Pegawai

### 1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Sebab tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang handal dan profesional. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan kebinamargaan sumber daya air, penataan ruang dan pertanahan, serta tata bangunan dan bina konstruksi, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang didukung oleh 110 Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sertifikat kompetensi sehingga efisiensi pegawai dapat dilakukan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan**

Jabatan	Satuan	Jumlah
Kepala Dinas	Orang	1
Sekretaris	Orang	1
Kepala Bidang	Orang	4
Sub koordinator	Orang	10
Kepala Sub Bagian	Orang	2
Kepala UPTD	Orang	9
Staf	Orang	83
<b>TOTAL</b>	<b>Orang</b>	<b>110</b>

Dari tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 total sebanyak 110 orang dengan rincian 1 Kepala Dinas dan 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 10 Sub Koordinator, 2 Kepala Sub Bagian, 9 Kepala UPTD serta 83 staf.

### 2) Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut;



**Tabel 1.2**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil**

Pendidikan	PNS
SD	-
SLTP	3
SLTA	71
Diploma	3
Sarjana (S <sub>1</sub> )	28
Pasca Sarjana (S <sub>2</sub> )	5
<b>Total</b>	<b>110</b>

Dari tabel 1.2 maka dapat diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 0 orang, SLTP/SMP sebanyak 3 orang, untuk tingkat pendidikan SLTA sebanyak 71 orang, Diploma 3 orang serta untuk tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 28 dan 5 orang dengan total Pegawai Negeri Sipil sebanyak 110 orang.

### 3) Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut;

**Tabel 1.3**  
**Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil**

Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah
I/a	-	II/a	5	III/a	41	IV/a	3
I/b	-	II/b	4	III/b	6	IV/b	2
I/c	1	II/c	21	III/c	3	IV/c	
I/d	-	II/d	9	III/d	15	IV/d	
						IV/e	
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>39</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>65</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL</b>							<b>110</b>

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang terdapat klasifikasi golongan diantaranya untuk golongan I sebanyak 2 orang, untuk golongan II sebanyak 39 orang, untuk golongan III sebanyak 65 orang sedangkan untuk golongan IV sebanyak 5 orang. Jadi jumlah keseluruhan pegawai dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 110 orang.



## 1.4 Sertifikat ASN

**Tabel 1.4**  
**Sertifikat ASN pada tahun 2023**

Terdapat beberapa sertifikat di peroleh dari pelatihan yang telah diikuti oleh Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, diantaranya:

No.	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH ASN	TAHUN
1	Sosialisasi Optimalisasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN	12	2023
2	Seminar Series	6	2023
3	Webinar Pengadaan Swakelola Pada Pekerjaan Konstruksi	1	2023
4	Webinar Nasional Program Akselerasi Pembelajaran Pemahaman Al Quran Terpadu	6	2023
5	Sosialisasi Peran Kejaksaan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah Guna Meningkatkan Pembangunan Di Daerah	1	2023
6	Webinar Asn Belajar Seri 41	6	2023
7	Webinar Asn Belajar Seri 32	10	2023
8	Webinar Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Bidang Konstruksi	1	2023
9	Smart Discussion Series Penguatan SAKIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang	6	2023
10	Webinar Asn Belajar Seri 37	9	2023
11	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Berdasarkan Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023	1	2023
12	Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan "Coaching Dan Mentoring Leadership" Bagi Pejabat Administrator Tahun 2023	1	2023
13	Workshop Coaching dan Mentoring Bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Kab. Jombang	2	2023
14	Pembinaan Teknis Pengelolaan Benturan Kepentingan	1	2023
15	Bedah Kasus, Pembinaan, dan Pengelolaan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1	2023
16	Webinar Asn Belajar Seri 35	6	2023
17	Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada ASN dan SDM di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang	9	2023
18	Webinar korpri	2	2023
19	Sosialisasi Konversi Jabatan Pelaksana Berdasarkan KEPMENPANRB 1103 Tahun 2022	1	2023
20	Focus Group Discussion (FGD) Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2023	1	2023
21	Rapat Koordinasi Teknis Analisis Pengembangan Kompetensi (AKPK) Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Pemkab. Jombang Tahun 2024	1	2023
22	Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pns Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024	1	2023



No.	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH ASN	TAHUN
23	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Berdasarkan Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023	1	2023
24	Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Ta 2023	3	2023
25	Manajerial Jabatan Pengawas	1	2023
26	Webinar Asn Belajar Seri 25	3	2023
27	Webinar Asn Belajar Seri 22	5	2023
28	Webinar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	1	2023
29	Webinar Asn Belajar Seri 20	8	2023
30	Webinar Asn Belajar Seri 8	5	2023
31	Webinar Asn Belajar Seri 13	4	2023
32	Webinar Asn Belajar Seri 11	4	2023
33	Webinar Asn Belajar Seri 5	1	2023
34	Seminar Bulan K3 Nasional 2023	4	2023
35	Webinar Asn Belajar Seri 3	5	2023
36	Webinar Asn Belajar Seri 45	7	2023
37	Webinar Asn Belajar Seri 21	3	2023
38	Webinar Asn Belajar Seri 19	1	2023
39	Webinar Asn Belajar Seri 18	1	2023
40	Webinar Bincang Stranas PK	1	2023
41	Webinar Asn Belajar Seri 17	1	2023
42	Bimbingan Teknik SE DJCK 03/SE/DC/2023	1	2023
43	Knowledge Sharing Forum Bersama Bina Teknik Jalan Dan Jembatan	2	2023
44	Webinar Asn Belajar Seri 12	1	2023
45	Knowledge Sharing Forum Bersama Bina Teknik Jalan Dan Jembatan	2	2023
46	Knowledge Sharing Forum Bersama Bina Teknik Jalan Dan Jembatan	1	2023
47	Webinar Asn Belajar Seri 7	3	2023
48	Sharring Session	2	2023
49	Webinar Asn Belajar Seri 43	4	2023
50	Webinar Asn Belajar Seri 42	6	2023
51	Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam PBJP Batch IV	2	2023
52	Webinar Asn Belajar Seri 33	2	2023
53	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	2023
54	Webinar Asn Belajar Seri 29	4	2023
55	Webinar Drainase Perkotaan untuk Kesejahteraan Masyarakat	1	2023
56	Seminar Nasional	7	2023
57	Narbo Webinar	4	2023
58	Sosialisasi Peran Kejaksaan Dalam Mendukung Pemerintah Daerah Guna Meningkatkan Pembangunan di Daerah	1	2023
59	Rapat Koordinasi Daerah Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1	2023



No.	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH ASN	TAHUN
60	Informasi Bahan Bangunan Webinar Series I	1	2023
61	Bimbingan Teknis Bidang Bahan dan Struktur Bangunan Gedung	1	2023
62	Sosialisasi Jasa Konstruksi	1	2023
63	Webinar Nasional	16	2023
64	Webinar Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	6	2023
65	Webinar Asn Belajar Seri 40	2	2023
66	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Berdasarkan Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023	1	2023
67	Pengadaan Swakelola pada Pekerjaan Konstruksi	1	2023
68	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengangkatan Pertama Teknik Pengairan (E-Learning) Angkatan II Tahun 2023	2	2023
69	Seminar Series Kendala Penanganan Sungai Tidak Maksimal Contoh Kasus Program Citarum Harum	1	2023
70	Pelatihan Perencanaan Teknis Embung (Distance Learning) Angkatan I Tahun 2023 yang disel	1	2023
71	Webinar Asn Belajar Seri 15	1	2023
72	Webinar Utilization Of Water Resources Information System (WRIS) In Integrated Flood Control Angkatan I Tahun 2023 yan	2	2023
73	Seminar jasa konstruksi	2	2023
74	Workshop Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi	3	2023
75	Webinar Series	3	2023
76	Pelatihan Perencanaan Drainase Perkotaan (Distance Learning) Angkatan I Tahun 2023 yang di	1	2023
77	Webinar SDA Muda Berdialog	1	2023
78	Pelatihan Provincial/Kabupaten Road Management System(PKRMS)	1	2023
79	Pelatihan Perjenjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama Angkatan Vi Tahun 2023	1	2023
80	Diklat Jasa Konstruksi	1	2023
81	Sosialisasi Peran Kejaksaaan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah Guna Meningkatkan Pembangunan Di Daerah	1	2023
82	Pembinaan dan Asistensi Implementasi e_BMD	1	2023
83	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Bendahara Pengeluaran Tahun 2023	1	2023
84	Rakor Penguatan Layanan Span Lapo dan PPID dalam Rangka	1	2023
85	Pedoman Sistem Mnajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	1	2023

### 1.5 Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang hendak dicapai adalah: “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan



Berdaya Saing”. Untuk mencapai visi Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yaitu Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing, maka dirumuskan 3 (tiga) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. **Misi pertama** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.
2. **Misi kedua** : Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya.
3. **Misi ketiga** : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal dan Industri.

Dalam rangka mendukung misi ketiga maka ditetapkan tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah. Sebagai penjabaran dari sasaran tersebut dapat ditentukan arah tujuan dari perangkat daerah. Tujuan ini merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2018-2023 yang menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka implementasi dari RPJMD atau penjabaran dari visi, misi dan tujuan maka hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang memiliki sasaran pembangunan daerah yaitu Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Untuk Daya Saing.

### 1.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)

**Tabel 1.5**  
**IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Definisi Operasional: - Jalan kondisi baik adalah jalan yang permukaan perkerasannya rata, tidak bergelombang dan mayoritas tidak ada kerusakan permukaan. - Dalam penentuan target target sebesar 65.75% : 1. Menyesuaikan dengan Target	Data survey dan laporan UPT PJJ	Bidang Bina Marga



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>pada Matrik Renstra Tahun 2023</p> <p>2. Pemeliharaan jalan Tahun 2023 diperkirakan tidak sebanding dengan jumlah kerusakan jalan yang terjadi.</p> <p>3. Untuk Tahun 2023 fokus dominan pada pelebaran jalan.</p> <p>Formula: - Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik / Jumlah total panjang jalan x 100%</p>		
2	Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	<p>Definisi Operasional: - Jumlah debit air di saluran irigasi yaitu rata-rata debit yang didapatkan dari pengukuran langsung pada bangunan ukur tiap-tiap saluran yang dilakukan oleh petugas OP. Pengukuran dilakukan sebanyak 2x dalam 1 hari yakni pukul 06.00 WIB dan 12.00 WIB.</p> <p>- Kebutuhan air irigasi merupakan kebutuhan air irigasi untuk lahan pertanian pada wilayah Kabupaten Jombang yang berasal pada dokumen Rencana Tata Tanam Global yang disusun</p>	Dokumen RTTG dan Laporan UPT PSDA	Bidang Sumber Daya Air



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			sebelum musim tanam yang didasarkan pada awal musim hujan tahun berjalan.  Formula: - Perbandingan jumlah debit air saluran irigasi dengan jumlah kebutuhan air terhadap total areal pertanian x 100%		
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	Definisi Operasional: -SPM Bina Konstruksi: Jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang bina konstruksi yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.  - Rekomendasi teknis IMB: Rekomendasi yang diberikan dinas teknis terkait untuk memperoleh izin mendirikan bangunan.	Data inventarisasi bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi
		Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	Formula: - Jumlah persentase pemenuhan tujuh layanan informasi jasa konstruksi.  - Jumlah rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti/Jumlah permohonan teknis IMB yang masuk sesuai prosedur x 100%		
4	Terwujudnya kesesuaian	Persentase Kesesuaian	Definisi Operasional: - Kesesuaian	Data pemanfaatan	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	pemanfaatan ruang	Pemanfaatan Ruang	pemanfaatan ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).  Formula: - Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan/Jumlah pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang x 100%	ruang bidang Tata Ruang dan Pertanahan	
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah	Definisi Operasional: - AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  Formula: - Hasil evaluasi AKIP tahun - n	Hasil evaluasi SAKIP	Kepala Dinas PUPR

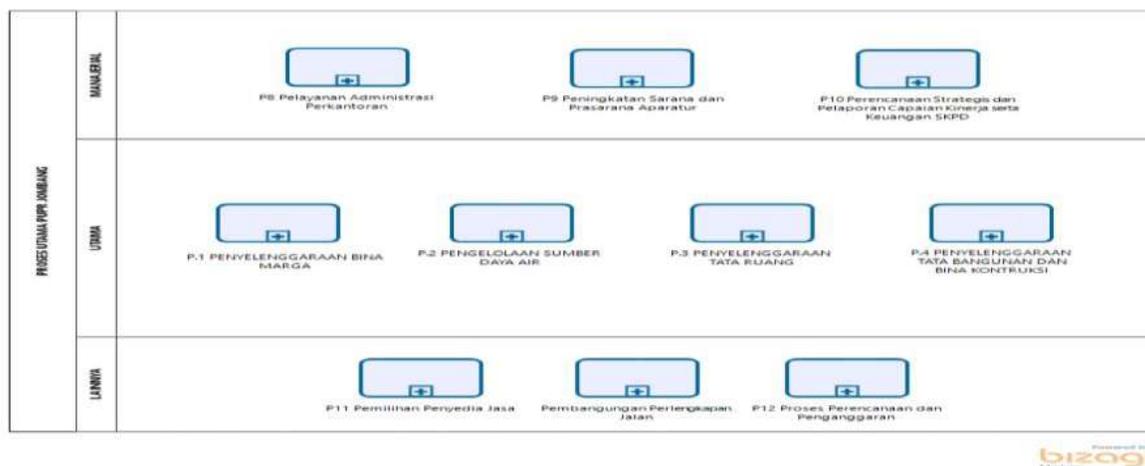
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang didukung oleh 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang tersebar di beberapa wilayah kerja dan 6 (enam) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air yang juga tersebar di beberapa wilayah kerja.

### 1.7 Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Adapun peta proses bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang sebagai berikut :



## 2 PROSES UTAMA PUPR JOMBANG



Pada proses bisnis level 0 menggambarkan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis pada unit kerja Dinas yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajerial dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

- a. Proses Inti atau utama. Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah;
  - Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi;
  - Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- b. Proses Pendukung atau manajerial. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Memenuhi kebutuhan pengguna internal;
  - Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.
- c. Proses Lainnya. Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



## 1.8 Ringkasan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh nilai 80,66 atau predikat A. Penilaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**Penilaian SAKIP**

No	Komponen	Bobot	Nilai 2022	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	27.48	30%	26.04
2	Pengukuran Kinerja	30%	24.96	30%	25.42
3	Pelaporan Kinerja	15%	8.05	15%	7.54
4	Evaluasi Kinerja	25%	20.16	25%	22.50
Nilai Hasil Evaluasi		100%	80.66	100%	81.49
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A</b> <b>(Memuaskan)</b>		<b>A</b> <b>(Memuaskan)</b>

Uraian singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

### a. Perencanaan Kinerja

- Target yang di tetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum memenuhi kriteria sebagai target yang baik, karena belum memenuhi kriteria “berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argument dan perhitungan logis” karena masih di dapati indikator sasaran dengan target yang tidak menantang dan dengan perhitungan yang tidak realistis. Hal tersebut di tunjukkan pada target kinerja tahun berjalan lebih rendah atau sama dengan capaian tahun sebelumnya.
- Target jangka menengah dalam Renstra telah di monitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, namun belum disebutkan secara detail untuk hambatan, upaya perbaikan dan rekomendasi pada setiap indikator sasaran, serta belum menjelaskan apakah target yang di tetapkan dalam renstra masih relevan dan tindak lanjut atas hasil monitoring tersebut .

### b. Pengukuran Kinerja

- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian ( pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui e-office Kabupaten, namun berdasarkan rekapitulasi penilaian yang di lampirkan atas pengukuran kinerja belum memenuhi penyesuaian pada pencapaian kinerja, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien yaitu belum di manfaatkan untuk identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan maupun rencana aksi yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja.



### c. Pelaporan Kinerja

- Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana, hanya menyajikan efisiensi sumber daya keuangan. .
- Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya di dasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah , adanya target kinerja yang telah tercapai diawal tidak di jadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.

### d. Akuntabilitas kinerja Instansi

- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah di tindaklanjuti namun belum dapat menggambarkan kenaikan capaian kinerja jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas di rekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, agar:

- Melakukan evaluasi atas target yang akan di tetapkan dengan dengan berdasarkan pada realisasi target tahun sebelumnya, hambatan dan permasalahan yang akan dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan.
- Memerintahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi atas hasil monitoring target jangka menengah dalam renstra tidak hanya monitoring pada program dan kegiatan, melainkan juga pada target kinerja, serta indikator sasaran secara rinci dan adaya bukti nyata tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- Menjadikan pengukuran kinerja yang di lakukan secara berkala sebagai dasar untuk menyesuaikan (Refocusing) organisasi, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang di tuangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan.
- Menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) dalam laporan kinerja.
- Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang yang memadai dalam laporan kinerja.



- Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya agar target kinerja yang di tetapkan dapat memenuhi kriteria "SMART" serta dapat memberi gambaran secara jelas mengenai kenaikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mengusulkan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang mengenai penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Berikut Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2018-2023 :

**Tabel 2.1  
Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti
		Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah

### 2.2 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023

Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



**Tabel 2.2**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dan RENSTRA 2018-2023**

TUJUAN RPJMD	Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan
	Terwujudnya penyediaan air yang cukup
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah

Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65.53 %	65.75 %	70.97%
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	84.00 %	85.00 %	73.15%
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100 %	100 %	100 %
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90 %	90 %	85 %
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.01%	80.01%	80.02%

Pada tabel 2.3 dapat diketahui bahwa target sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, dengan indikator Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Tahun 2023 sebesar 65.75 % dari jumlah panjang Jalan dalam kondisi baik di bagi jumlah total panjang jalan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x 100%,



pada target sasaran kedua Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup dengan indikator Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian sebesar 85.00 % diperoleh dari perbandingan jumlah debit air saluran irigasi dengan jumlah kebutuhan air terhadap total areal pertanian x 100%.

Target sasaran ketiga yaitu meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur dengan dua Indikator Kinerja yaitu, Pertama Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang ditindaklanjuti sebesar 100% di peroleh dari jumlah rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti dibagi jumlah permohonan teknis IMB yang masuk sesuai prosedur x 100%. Kedua Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi sebesar 100% yang diperoleh dari jumlah persentase pemenuhan tujuh layanan informasi jasa konstruksi.

Target Sasaran keempat yaitu Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 90% yang di peroleh dari Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan/Jumlah pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang x 100%.

Target Sasaran kelima yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan target Tahun 2023 sebesar 80.01 yang di peroleh dari Hasil evaluasi AKIP.



PK P-APBD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 800/700/415.01/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAYU PANCOROADI, S.T., M.T.**  
Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**  
Jabatan : **Pj. Bupati Kabupaten Jombang**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 4 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang

Ditandatangani secara elektronik



**BAYU PANCOROADI, ST., MT.**  
NIP. 197412092003121002

PIHAK KEDUA  
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**



KODE UNIT : 415.18

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,75%
2.	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	85,00%
3.	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase pemenuhan SPM Bina Konstruksi	100,00%
		Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100,00%
4.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90,00%
5.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (80,01)

N O	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Tercapainya panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan (km)	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	73,05%	109.291.221.944
	Tercapainya jembatan yang di rehabilitasi		Persentase jembatan dalam kondisi standar	30,32%	
2.	Terkelolanya jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Nilai kinerja sistem irigasi	75,97%	7.537.343.647
3.	Meningkatnya pemenuhan SPM Tata Bangunan	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100,00%	5.339.176.020
4.	Terupdatenya HSBGN Tata Bangunan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100,00%	10.599.999.905
5.	Meningkatnya pemenuhan SPM Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100,00%	668.235.390



KODE UNIT : 415.18

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



N O	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
6.	Terselenggaranya penataan ruang yang sesuai dengan ketentuan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100,00%	2.421.372.200
7.	Terfasilitasinya permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang di tindak lanjuti	100,00%	328.872.600
8.	Tersedianya data aset tanah milik Pemda secara spasial untuk mendukung perencanaan tata ruang	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	65,00%	284.084.420
9.	Terlaksananya urusan penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100,00%	32.192.125.900
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>168.662.432.026</b>

Jombang, 4 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang

Ditandatangani secara elektronik



**BAYU PANCORADI, ST., MT.**  
NIP. 197412092003121002

PIHAK KEDUA  
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KODE UNIT : 415.18



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Sesuai dengan Inpres No. 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic. Untuk menunjang keberhasilan visi dan misi Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023, pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang melaksanakan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah di tetapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan. dalam rangka melakukan evaluasi kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka diperoleh hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

##### 3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan target sasaran strategis dan program dengan realisasi tahun 2023.

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan</b>	<b>Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik</b>	<b>65,75%</b>	<b>65,75%</b>	<b>100%</b>
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	73,05%	74,63%	102,16%
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,32%	30,32%	100%
2	<b>Terwujudnya penyediaan air yang cukup</b>	<b>Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian</b>	<b>85,00%</b>	<b>88,60%</b>	<b>104,24%</b>
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	75,97%	79,19%	104,24%
3	<b>Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur</b>	<b>Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	100%	100%



No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100%	100%	100%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	100%	100%
4	<b>Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>90,00%</b>	<b>95,19%</b>	<b>105,77%</b>
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	65,00%	65,00%	100%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%
5	<b>Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>80,01%</b>	<b>81,49%</b>	<b>101,85%</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%

Pada tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 sebagaimana yang ada pada tabel menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada sasaran strategis rata - rata telah tercapai sebesar 101,98%. Dari beberapa sasaran diatas, indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang memiliki capaian kinerja tertinggi yaitu sebesar 105,56%, hal ini terjadi karena adanya kemudahan akses terhadap layanan informasi tata ruang secara elektronik sehingga masyarakat dapat memastikan di awal terkait kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

### 3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan 2 (dua) tahun terakhir

Berikut perbandingan realisasi tahun ini dengan dua tahun sebelumnya;



**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

No	Sasaran Strategis -Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Keterangan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan</b>	<b>Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik</b>	<b>65,75%</b>	<b>65,28%</b>	<b>66,98%</b>	<b>65,75%</b>	Sudah sesuai dengan target yang di tetapkan
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	73,05%	71,99%	73,70%	74,63%	
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,32%	30,00%	30,64%	30,32%	
2	<b>Terwujudnya penyediaan air yang cukup</b>	<b>Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian</b>	<b>85,60%</b>	<b>83,53%</b>	<b>92,07%</b>	<b>88,60%</b>	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	79,19%	73,84%	81,78%	79,19%	
3	<b>Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur</b>	<b>Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
		<b>Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	100%	100%	100%	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100%	100%	100%	100%	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	100%	100%	100%	
4	<b>Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>90,00%</b>	<b>82%</b>	<b>99,20%</b>	<b>95,19%</b>	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	65,00%	31,04%	56,48%	65,00%	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	
5	<b>Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>80,01%</b>	<b>77,31%</b>	<b>80,66%</b>	<b>81,49%</b>	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	



Pada tabel di atas dapat dilihat sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan terdapat penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 di sebabkan oleh banyaknya ruas jalan yang umur kostrusinya sudah habis, pada sasaran ke dua yaitu Terwujudnya penyediaan air yang cukup juga mengalami penurunan di sebabkan ada perbedaan formulasi pada tahun sebelumnya, pada sasaran ketiga Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur realisasinya sama yaitu 100%, pada sasaran keempat Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang juga mengalami penurunan yaitu dari 99,20% menjadi 95,00% di sebabkan adanya penurunan jumlah permohonan rekom pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan yaitu pada tahun 2022 terdapat 128 permohonan dan pada tahun 2023 menurun jadi 108 permohonan, pada sasaran kelima yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Meskipun ada penurunan dari beberapa sasaran, tetapi capaian kinerja tahunan sudah mencapai 100% bahkan lebih, dan dapat dilihat ada beberapa sasaran yang realisasinya tidak dapat diperbandingkan antara tahun 2021 dengan tahun 2022 sampai tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya perubahan target dan formulasi.

### 3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah

Untuk mengetahui tingkat kemajuan target yang telah di tetapkan dalam RPJMD, maka dapat diketahui realisasi sampai dengan tahun 2023 ;

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra**

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan</b>	<b>Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik</b>	<b>65,75%</b>	<b>65,75%</b>	<b>100,00%</b>
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	72,47%	74,63%	102,16%
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,32%	30,32%	100,00%
2	<b>Terwujudnya penyediaan air yang cukup</b>	<b>Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian</b>	<b>85,00%</b>	<b>88,60%</b>	<b>104,24%</b>
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	75,97%	79,19%	104,24%
3	<b>Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur</b>	<b>Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>



No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	100%	100,00%
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100%	100%	100,00%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	100%	100,00%
4	<b>Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>90,00%</b>	<b>95,19%</b>	<b>105,77%</b>
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100,00%
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	40,00%	65,00%	162,50%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	100%	100,00%
5	<b>Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>80,01%</b>	<b>81,49%</b>	<b>101,85%</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100,00%

Pada akhir periode yaitu tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023, realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa sasaran yang realisasinya melebihi dari target yang di tetapkan yaitu pada sasaran Terwujudnya penyediaan air yang cukup telah mencapai 104,24%, pada sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu sebesar 105,77%, dan sasaran Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah yaitu 101,85%. Sehingga dapat dilihat bahwa Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang sudah menyelesaikan realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari lima sasaran strategis dan 9 program yang ada, semuanya sudah sesuai dengan target, serta ada pula yang melebihi target akhir RPJMD. Meskipun telah sesuai dengan target akhir RPJMD namun kinerja akan terus ditingkatkan.

### 3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi provinsi



Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi/Nasional

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Provinsi/Nasional tahun 2023	Keterangan
1	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan</b>	<b>Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik</b>	65,75%	77%	Perbandingan Jalan Baik Kabupaten Jombang dengan Nasional
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	74,63%		
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,32%		
2	<b>Terwujudnya Penyediaan Air Yang Cukup</b>	<b>Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian</b>	88,60%	86,18%	Perbandingan dengan realisasi provinsi
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	79,19%		
3	<b>Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur</b>	<b>Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti</b>	100%		Untuk Proses Perizinan Penerbitan PBG, Kab. Jombang tertinggi di Provinsi Jawa Timur dan Peringkat 8 Nasional dengan Kabupaten/Kota lainnya
		<b>Presentase Pemenuhan SPM Bina Konstruksi</b>	100%		
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%		
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100%		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%		
4	<b>Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang</b>	<b>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</b>	95,19%		Untuk Proses Perizinan Penerbitan KKPR, Kab. Jombang Peringkat 1 di Provinsi Jawa Timur dan Peringkat 6 Nasional
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%		
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	65,00%		
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%		



No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Provinsi/Nasional tahun 2023	Keterangan
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,49%	63,26%	Rata-rata nilai SAKIP Kab/Kota Nasional
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%		

Pada tabel di atas, perbandingan yang dilakukan adalah realisasi Perangkat Daerah yang di sandingkan dengan realisasi Provinsi, untuk realisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023, sudah melebihi target pada realisasi Provinsi.

### 3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023. Berikut ini identifikasi penyebab keberhasilan Program Kegiatan selama Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang:

#### a. Bidang Bina Marga

Tercapainya target sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Jombang ditunjang oleh satu kegiatan yakni Pemeliharaan jalan Kabupaten/ Kota (pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jalan dan rehabilitasi jembatan). Adapun keberhasilan ini di dukung oleh:

- Perencanaan penanganan berdasarkan tingkat kerusakan jalan dan jembatan sesuai hasil survey dan usulan masyarakat (musrenbang) sehingga penanganan bisa cepat dan tepat sasaran.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup (coldmix dan aspal drum) serta personil lapangan yang memadai (tenaga URC dan UPT PJJ yang mumpuni) sehingga tepat dalam proses penanganan.
- Pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi (monev) di lakukan secara berkala dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga pekerjaan berjalan sesuai rencana.

#### b. Bidang Sumber Daya Air

Keberhasilan bidang Sumber Daya Air , di dukung oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

- Adanya kegiatan pemeliharaan rutin yg bertujuan menjaga fungsi dan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik.
- Adanya operator alat berat yang terampil



- Adanya staf alat berat yang memiliki keahlian dalam perbaikan alat berat sehingga kondisi alat berat dalam keadaan baik dan prima.
- Adanya koordinasi yg baik diantara pengelola irigasi (Dinas dan HIPPA/ GHIPPA) terutama pada saat pembagian air maupun pemeliharaan jaringan irigasi yg bersifat ringan.
- Adanya tenaga lapangan yang handal dalam melaksanakan tugas, baik itu pada saat musim kemarau (pembagian air) maupaun musim penghujan (kondisi banjir).

**c. Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi :**

Keberhasilan kinerja di bidang Tata bangunan dan Bina Konstruksi di dukung oleh beberapa hal di antaranya adalah;

- Adanya Standar Operasional Procedur (SOP) pada berbagai pelayanan publik.
- Adanya Aplikasi SIMBG yang terintegrasi dengan kementrian PUPR.
- Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dari berbagai stake holder pada kegiatan Tata Bangunan dan Bina Konstruksi.

**d. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan**

Keberhasilan kinerja di bidang Tata Ruang dan Pertanahan di dukung beberapa hal di antaranya adalah;

- Adanya kemudahan akses terhadap layanan informasi tata ruang secara elektronik sehingga masyarakat dapat memastikan di awal terkait kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.
- Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antara stakeholder baik dari perangkat daerah terkait maupun dengan penerima layanan dalam rangka fasilitasi layanan di bidang Tata Ruang.
- Terlaksananya layanan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) secara online melalui [bit.ly/tarujombang](https://bit.ly/tarujombang) sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengajukan maupun memantau proses KRK yang sedang di ajukan secara online.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

#### **3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran**

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, jumlah anggaran pada tahun 2023 sebesar 174.339.811.026,00 dan alokasi anggraran sebesar 144.576.086.399,00 sehingga terdapat prosentase penyerapan 82,93%. Adapun sisa anggaran sebesar 29.763.724.627,00 atau 17.07%.



**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,75%	65,75%	100%	114.968.600.944	101.714.335.724	88,47%
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	73,05%	74,63%	102,16%	105.060.510.728	92.877.594.424	88,40%
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,32%	30,32%	100%	9.908.090.216	8.836.741.300	89,19%
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	85,00%	88,60%	104,24%	7.537.343.647	7.418.503.167	98,42%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	75,97%	79,19%	104,24%	7.537.343.647	7.418.503.167	98,42%
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	15.939.175.925	4.483.940.539	28,13%
		Persentase pemenuhan SPM Bina Konstruksi	100%	100%	100%	668.235.390	654.782.547	97,99%
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	100%	100%	5.339.176.020	3.269.436.249	61,23%
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100%	100%	100%	10.599.999.905	1.214.504.290	11,46%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	100%	100%	668.235.390	654.782.547	97,99%
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90%	95%	105,56%	3.034.329.220	2.937.121.275	96,80%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	2.421.372.200	2.330.919.175	96,26%
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	65%	65%	100%	284.084.420	282.707.440	99,52%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	328.872.600	323.494.660	98,36%
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01%	81,49%	101,85%	32.192.125.900	27.367.853.147	85,01%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja	100%	100%	100%	32.192.125.900	27.367.853.147	85,01%



No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Daerah Kabupaten Kota	Aparatur						

Dari tabel diatas dapat di lihat, realisasi kinerja tahun 2023, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang sudah mencapai 101,98% dan sesuai dengan target yang telah di tetapkan , sedangkan realisasi anggaran mencapai 82,93% hal ini di sebabkan adanya selisih antara pagu anggaran dengan nilai kontrak yang telah di tawarkan penyedia pada proses pengadaan barang dan jasa.

### 3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam tabel dibawah ini dapat diketahui mengenai tingkat efisiensi pada tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	100,00%	88,47%	11,53%	
		Program Penyelenggaraan jalan				
		Persentase jalan dalam kondisi mantap	102,16%	88,40%	13,76%	
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	100,00%	98,42%	1,58%	
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	104,24%	98,42%	5,82%	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	104.24%	98,42%	5,82%
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100,00%	28,13%	71,87%	
		Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100,00%	97,99%	2,01%	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100,00%	61,23%	38,77%
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100,00%	11,46%	88,54%
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100,00%	97,99%	2,01%
4	Terwujudnya kesesuaian	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	105,56%	96,80%	8,97%	



No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	<b>pemanfaatan ruang</b>				
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100,00%	96,26%	3,74%
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	100,00%	99,52%	0,48%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100,00%	98,36%	1,64%
5	<b>Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>101,85%</b>	<b>85,01%</b>	<b>16,84%</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100,00%	85,01%	14,99%

Pada tabel di atas Secara keseluruhan, capaian kinerja pada program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang sebesar 101,98% tetapi penyerapan anggaran yang hanya mencapai 82,93%. Dari penyerapan anggaran dapat di lihat Efisiensi anggaran tahun 2023 sebesar 17,07%, yang merupakan nilai sisa kontrak.

### 3.2.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Dalam tabel dibawah ini dapat diketahui mengenai tingkat efisiensi SDM pada tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

**Tabel 3.7**

#### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2023**

KINERJA TAHUN 2023			SUMBER DAYA MANUSIA			EFISIENSI SDM
TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	BEZETING PEGAWAI PER 31 DESEMBER 2023	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
100	100	100%	1265 Orang	110 Orang	8,70%	91,72% / EFISIEN
100	100	100%				
65	65	100%				
100	100	100%				
100	100	100%				
100	100	100%				
100	100	100%				
73.05	73.05	100%				
30.32	30.32	100%				
75.97	79.19	104.24%				
		<b>100,42%</b>			<b>8,70%</b>	

Berdasarkan tabel Efisiensi Sumber Daya Manusia Tahun 2023 diatas, dapat dilihat bahwa standar bezeting pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten



Jombang Tahun 2023 adalah sebanyak 1.265 orang agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan secara optimal. Namun dalam prakteknya, hanya tersedia 108 orang dengan predikat kinerja pegawai 'Baik' dan 2 orang dengan predikat kinerja pegawai 'Sangat Baik' sehingga kinerja tahun 2023 mendapatkan persentase capaian sebesar 100,42% dengan tingkat efisiensi sebesar 91,72%.

### 3.2.4. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mempermudah kinerja aparatur/pegawai dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berikut sarana prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

**Tabel 3.8**  
**Sarana dan Prasaran Penunjang Pekerjaan**

No	Jenis	Unit	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Kendaraan Roda 4 (empat):				
	- Mini Bus	9	7	-	2
	- Pick Up	15	12	-	3
2	Kendaraan Roda 2 (dua)	55	50		5
3	Alat Berat:				
	- Dump Truck	2	2	-	-
	- Eskavator	7	7	-	-
	- Trailer	2	2	-	-
	-Wales Besar (6-8 ton)	7	5	1	1
	- Vibrating Roller	9	8	1	-
	- Truk Angkut	2	2	-	-
	- Truk Crane / Skylift	1	1	-	-
- Telehandler	1	1	-	-	

Pada sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2023 ada beberapa yang belum terpenuhi yaitu Dump Truck sebanyak 3 unit dari ketersediaan sebanyak 2 dan Eskavator sebanyak 9 unit dari ketersediaan sebanyak 7 unit. Jadi total kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah sebanyak 120 unit. Namun dalam prakteknya, hanya tersedia 106 unit dari total 117 unit sarana dan prasarana yang berada dalam kondisi BAIK dan bisa digunakan untuk menunjang pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Sisanya sebanyak 11 unit dinyatakan dalam kondisi SEDANG dan RUSAK. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2023 persentase ketersediaan sarana prasarana yang digunakan adalah sebesar 86,60% dari total standar kebutuhan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan masih pada 86,60% dan perlu diperhatikan dengan serius untuk dilakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai



dengan kebutuhan agar tetap optimal pada pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### 3.2.5. Upaya Perbaikan Kinerja

Sasaran Terwujudnya Penyediaan Air Yang Cukup upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Adapun strategi/upaya pemecahan masalah dalam Rencana Tindak Lanjut adalah dengan melanjutkan pekerjaan Rehabilitasi Bendung Bareng pada tahun 2023 dan pembayaran akan dilaksanakan pada P-APBD tahun 2023;
- b. Meningkatkan kualitas koordinasi yang intensif, baik koordinasi internal, koordinasi dengan dengan organisasi perangkat daerah tentang kendali, maupun koordinasi dengan instansi vertikal / instansi terkait;
- c. Meningkatkan produktifitas dan evisiensi kerja, responsivitas dan akuntabilitas kinerja;
- d. Meningkatkan kompetensi SDM bidang SDA dengan mengikuti pelatihan diantaranya, pelatihan SMK3, pelatihan pengawasan jaringan irigasi dan pelatihan petugas OP jaringan irigasi;
- e. Menambah alat penunjang kegiatan operasional (alat berat) untuk meningkatkan kinerja bidang SDA dalam pelayanan masyarakat terutama pada pekerjaan normalisasi saluran yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
- b. Pemantauan dan Evaluasi terhadap kemajuan pencapaian target kinerja beserta hambatannya yang dilakukan secara berkala dan kontinyu pada saat rapat koordinasi rutin;
- c. Meningkatkan komunikasi atau koordinasi dengan pihak ketiga, untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara berkala terkait rencana kerja dan progres pekerjaan sehingga dapat dipastikan pekerjaan akan selesai sesuai target penyerapan anggaran yang telah direncanakan.

Sasaran Terwujudnya Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:



- a. Percepatan proses pengadaan barang/jasa;
- b. Mempercepat identifikasi rencana kegiatan;
- c. Melakukan metode pengadaan barang/jasa melalui e purchasing (e-katalog).

Sasaran Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan perizinan PBG dan SLF kepada masyarakat;
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap kewajiban akan PBG dan SLF;
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dengan memberikan pelatihan jasa konstruksi;
- d. Meningkatkan kualitas badan usaha jasa konstruksi dengan melakukan pembinaan jasa konstruksi;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan yaitu mempersiapkan lebih awal terkait penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tindak lanjut dari penilaian dan tindak lanjut SAKIP tahun sebelumnya;
- b. Meningkatkan monitoring kegiatan, tiap bulan untuk menjadi evaluasi tiap tribulan secara berkala;
- c. Mengajukan bimtek untuk menunjang peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu sarana introspeksi dan koreksi dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Meskipun dari hasil pelaporan dan analisis indikator sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah.

Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian besar dan mengakibatkan terlambatnya proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan. Keterbatasan kapabilitas SDM dibidang akuntabilitas kinerja menjadi salah satu penyebab lambatnya proses akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Sehingga evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan perbaikan akuntabilitas kinerja secara terus menerus dan hasilnya akan lebih baik dan bermanfaat.



## BAB IV PENUTUP

Secara makro dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada tahun 2023 yang terdapat pada Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, secara rata-rata capaian kinerja sebesar 101,98%.

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan tersebut, dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang telah melakukan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang yang bertugas untuk melakukan monitoring secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap target dan realisasi indikator capaian kinerja;
- b. Mempertahankan kondisi jalan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan rutin;
- c. Melaksanakan lelang awal tahun;
- d. Melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi pekerjaan;
- e. Mempertahankan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- f. Melaksanakan kerjasama yang intens dengan badan atau instansi yang berhubungan dengan pembinaan jasa konstruksi dan kebutuhan tenaga kerja yang bersertifikat dari penyedia jasa konstruksi;
- g. Pemenuhan kegiatan sesuai dengan SOP;
- h. Adanya koordinasi yang baik antara pengguna jasa (Dinas PUPR Kabupaten Jombang) dan penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor), dalam pelaksanaan perencanaan, kegiatan fisik dan pengawasan pekerjaan jaringan irigasi;
- i. Peningkatan kemampuan HIPPA/GHIPPA dalam melaksanakan sistem irigasi partisipatif supaya terjaga jaringan irigasi dalam kondisi baik;
- j. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan agar pada tahun 2024 sesuai dengan spesifikasi;
- k. Meningkatkan kemampuan petugaspengelola irigasi dalam melaksanakan pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini dibuat agar menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dimasa yang akan datang.

Jombang, Januari 2024  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Jombang



**BAYU PANCOROADI, ST. MT.**

Pembina Tk. I  
NIP. 197412092003121002

